

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana negara yang menganut sistem ini mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut atau sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan diselenggarakan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memilih pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur kekuasaan-kekuasaan di dalam suatu negara, untuk saat ini negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil yang merupakan adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (*trias politica*) yang memiliki prinsip "*checks and balances*" yang telah tertuang dalam konstitusi (Yani, 2018).

Dalam memilih pemegang kekuasaan di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu, untuk kekuasaan Yudikatif dipilih secara tidak langsung oleh rakyat dan untuk pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan azas penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan mulai diterapkan pada era reformasi dan sistem pemilihan langsung dalam memilih pejabat eksekutif dan legislative mewakili kepentingan spesifik warganegara diantaranya kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, anti korupsi, dan sejenisnya dibawakan partai politik

dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004 dan 2009 terpilihnya presiden Susilo Bambang Yudoyono dan 2014 dan 2019 terpilihnya presiden Joko Widodo yang diusung oleh partai politik, (Kosmas, 2009). Hal ini dikarenakan Negara Indonesia tetap konsisten bahwa sistem demokrasi digunakan sebagai cara untuk mengelolah kehidupan bernegaranya dan partai politik di tempatkan sebagai alat yang penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara. Tidak bisa di pungkiri bahwa partai politik merupakan pilar dari sistem demokrasi dan tanpa partai politik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat juga dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya kehidupan Negara yang demokratis, amat tergantung pada keberadaan partai politik dalam penentuan pejabat yang dipilih untuk mengatur kewenangan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam kiprah politiknya Ir. Joko Widodo sebelum menjadi presiden Republik Indonesia (RI) karir politiknya dimulai pada tahun 2005 menjabat sebagai Walikota Solo yang diusung oleh dua partai politik yaitu PDI-P dan PKB dengan persentase suara sebesar 36, 62% dan terpilih kembali menjadi walikota solo pada tahun 2010 dengan suara melebihi 90%, selang dua tahun menjabat yaitu Ir. Joko Widodo kembali dicalonkan oleh PDI-P sebagai Gubernur DKI Jakarta dan partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagai partai koalisi, (Utomo, 2012). Hal ini dikarenakan kepemimpinan populisnya diantaranya adalah berhasil memindahkan pedagang kaki lima (PKL) dari Taman Banjarsari ke Pasar Klitikan, empat tahun silam, tanpa adanya konflik atau bentrokan antar pedagang dengan aparat dan sekitar 900 orang pedagang akhirnya mau meninggalkan Taman Banjarsari di pusat Kota Solo

menuju lokasi baru di Pasar Klitikan yang menjadi salah satu keberhasilan Joko Widodo yang menjadikannya pemimpin yang populer dan dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

Setelah dilakukan pemilihan dengan hasil Ir. Joko Widodo yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta Jokowi melakukan berbagai banyak perubahan dan terobosan yang khas dengan gaya blusukanya yang membuatnya semakin populer dalam memimpin DKI Jakarta sehingga berlanjut pada tahun 2014 Ir. Joko Widodo mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI-P untuk maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dengan Jusuf Kalla sebagai calon Wakil presiden dengan hasil Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon (paslon) sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 (Damayanti, 2017).

Pada proses pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada periode pertama terbentuklah dua kekuatan koalisi partai politik yaitu antara koalisi partai pendukung paslon Joko Widodo – Jusuf Kalla dan Prabowo – Hatta dan periode kedua juga terbentuknya dua kekuatan koalisi partai politik dengan dukungan koalisi partai politik yang mendukung paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon Prabowo-Sandiaga Uno (Nugroho, 2019), dengan perbandingan dukungan koalisi partai politik

dan hasil pemilihan presiden dan antara periode pertama dan periode kedua adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Data Perbandingan Dukungan Koalisi Partai Politik Antara Pemilu 2014 Dengan Pemilu 2019**

No	Pasangan Calon	Jumlah Kursi/(Persentase Suara)	Total Kursi/(Persentase Suara)	Hasil Pemilihan Jumlah/(Persentase)
<b>Periode Pertama Tahun 2014-2019</b>				
1	Prabowo-Hatta	- GERINDRA 73/(11,81 %) - PAN 49/(7,59%) - PPP 39/(6,53%) - PKS 40/(6,79%) - PBB 0/(0 %) - GOLKAR 91/(14,75) - DEMOKRAT 61/10,19%	353/(57,66%)	62.576.444/(46,85%)
2	Jokowi-Kalla	- PDI 109/(18,95%) - NASDEM 35/(6,72%) - PKB 47/(9,04%) - HANURA 16/(5,26%) - PKPI 0(0.0%)	207/(39,97%)	70.997.851/(53,15%)
<b>Periode Kedua Tahun 2019-2024</b>				
1	Jokowi-Amin	- PDI 109/(18,95%) - NASDEM 35/(6,72%) - PKB 47/(9,04%) - HANURA 16/(5,26%) - GOLKAR 91/(14,75) - PPP 39/(6,53%) - Perindo (0,0%) - PSI (0,0%) - PKPI (0,0%)	337/(61,25%)	85.607.362/(55,5%)
2	Parabowo-Sandiaga	- GERINDRA 73/(11,81 %) - PAN 49/(7,59%) - PKS 40/(6,79%) - DEMOKRAT 61/10,19% - BERKARYA (0,0%)	223/(36,38%)	68.650.239/(44,5%)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI Tahun 2023

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pemilihan presiden pada tahun 2014 dan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Prabowo-Hatta yang diusung enam partai politik dengan total dukungan 353 kursi di parlemen atau 57,66% suara ditambah satu dari partai non parlemen yaitu PBB dan paslon Jokowi-kalla diusung empat partai politik dengan total dukungan 207 kursi di parlemen atau 39,97% suara ditambah satu dukungan dari partai non parlemen yaitu PKPI dan setelah dilakukanya proses pemilihan presiden paslon Jokowi-Kalla unggul dan menjadi pemenang dengan perolehan suara mencapai 70.997.851/(53,15%) dan pasangan Prabowo-Hatta dibawanya dengan perolehan suara mencapai 62.576.444/(46,85%) dengan selisih suara sebanyak 8.421.389 dari pertarungan politik antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-kalla pada tahun 2014 (Wulandari, 2017).

Pada tahun 2019 pemilihan presiden juga diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Jokowi-Amin dengan enam partai pendukung karena dua partai pendukung Prabowo pada pemilihan presiden tahun 2014 beralih dukungan, selain itu Jokowi mendapatkan tiga tambahan dukungan dari partai non parlemen yaitu PSI, Perindo dan PKPI yang bergabung dalam koalisi partai politik pemenangan Joko Widodo menjadi calon presiden sehingga pada periode kedua dukungan Joko Widodo dan pasanganya Ma'ruf Amin dengan total dukungan 337 kursi di parlemen atau 61,25% suara dan kandidat kedua selaku kandidat penantang yaitu paslon Prabowo-Sandiaga bermodalkan dengan empat partai pendukung dengan total dukungan 223 kursi di parlemen atau 36,38% suara ditambah satu dukungan partai non parlemen yaitu

partai Berkarya, dimana dukungan partai untuk pemilihan presiden tahun 2019 memakai acuan jumlah kursi atau suara hasil pemilu tahun lalu yaitu tahun 2014 serta pelaksanaan pemilihan legislative dan eksekutif dilaksanakan secara serentak, dimana sebelumn-sebelumnya dilakukan secara terpisah dan pemenang pada pemilihan presiden pada tahun 2019 kembali dimenangkan oleh kandidat Joko Widodo dengan pasangan wakil presidennya Ma'ruf amin dengan perolehan suara mencapai 85.607.362/(55,5%) dan paslon Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara hanya 68.650.239/(44,5%) dengan selisih suara sebanyak 16.957.123 dari pertarungan pemilihan presiden pada tahun 2019 antara paslon Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandiaga (Shaliha, 2021).

Dari dua hasil pemilihan presiden kandidat Joko Widodo selalu unggul dan menjadi pemenang secara beruntun pada pemilihan presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 dan kemenangan Jokowi menjadi presiden tidak ditentukan oleh berapa banyaknya dukungan koalisi partai politik, maupun sedikit atau banyak dukungan koalisi partai politik tidak terlalu mempengaruhi kemenangan presiden Joko Widodo pemenang dalam pemilihan presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 dan factor yang mempengaruhi kemenangan Joko Widodo dari figure nya yang merakyat ditambah lagi dengan strategi kampanye blusukanya dengan langsung menjumpai masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah, sehingga dengan hal tersebut Joko Widodo menjadi kandidat yang melekat di hati masyarakat menjuadi factor penentu kemenanganya dalam pemilihan



presiden pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, tentunya jika dibandingkan dengan Prabowo malah lebih cenderung melakukan kampanye dengan model elitis dan hal yang menjadi penentu kemenangan presiden pada tahun 2014 dan 2019 ditentukan berdasarkan figure yang merakyat (Damayanti et al).

Selama menjabat hal yang menjadi kontroversi dari dua periode kepemimpinan presiden Joko Widodo adalah cukup sering melakukan reshuffle pada kabinet pemerintahannya, dimana memang reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, tentu dengan terjadinya reshuffle kabinet dipengaruhi oleh sebab dan akibat geopolitik yang terjadi dan dikutip dari Efriza (2019 : 1) dalam jurnal *Politica* Vol. 9 No. 1 Juni 2018 menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk membentuk koalisi yang berbasis ideologis dan program yang sama (consensus coalition) antar partai politik, namun dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk mewujudkannya disebabkan stabilitas pemerintahan terganggu di awal masa pemerintahan, sehingga pada akhirnya Presiden Jokowi memilih mewujudkan koalisi “semua partai.” Menggunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial, dilengkapi juga dengan beberapa pemikiran lainnya mengenai Koalisi, hal ini dilakukan Jokowi tentunya telah melihat keberhasilan pola koalisi partai politik yang dilakukan dua periode pemerintahan SBY dimana hal ini tentu mengingkari janji kampanye Jokowi yang ingin bertekad untuk memulai suatu budaya politik yang baru, yaitu konsep koalisi tanpa adanya politik transaksional (Ari Ganjar Herdiansah, 2015),

untuk lebih jelasnya reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.2 : Reshuffle Kabinet Pada Priode Pertama dan Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

No	Reshuffle (Jilid)	Jadwal	Jumlah Pejabat Diganti	Keterangan
<b>Periode I</b>				
1	I	12-08-2015	6	Percepatan Kerja Kabinet
2	II	27-07-2016	14	Kabinet bekerja lebih cepat, efektif dan kerjasama yang solid dengan juga merekrut kader partai Golkar airlangga dan kader partai PAN Asman Abnur yang merupakan dari partai oposisi (KMP) yang pada saat menjelang pilpres 2014 adalah partai pengusung Capres Prabowo subianto
3	III	17-01-2018	2	Pengunduran diri Pejabat Menteri Sosial Khofifah dan kepala staff kepresidenan diganti untuk percepatan kinerja cabinet
4	IV	15-08-2018	1	Pejabat Menpan RB mengundurkan diri karena partainya PAN menolak mendukung Jokowi pada pilpres 2019
<b>Periode II</b>				
1	I	22-12-2020	6	Dua pejabat menteri terlibat korupsi dan empat menteri diganti untuk mempercepat kinerja kabinet
2	II	28-04-2021	2	Presiden membentuk dua kementerian baru dan melebur dua kementerian yaitu kemendikbud dengan kemenristek dan membentuk kemeterian investasi
3	III	15-06-2022	2	Refreshing dan Memperkuat Kabinet
	IV	03-04-2023	1	Menteri sebelumnya mengundurkan diri

*Sumber : Kementerian Sekretaris Negara 2023.*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa presiden Joko Widodo Selama menjabat presiden telah melakukan delapan kali Reshuffle pada kabinetnya empat kali pada cabinet kerja dan empat kali cabinet Indonesia maju dan



berdasarkan keterangan Joko Widodo Melakukan Reshuffle dengan alasan yang bermacam-macam diantaranya pada periode 2014-2019 adalah untuk percepatan kerja cabinet, mensolidkan kerjasama antar kementerian dan ada pejabat menteri yang mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan karena maju dalam pemilihan kepala daerah, daerah dan pada periode ini terbentuk dua kekuatan partai politik antara pro dan oposisi pemerintah, namun hal tersebut tidak bertahan lama karena tiga partai seperti PAN, GOLKAR dan PPP bergabung dengan koalisi pemerintahan dan disisi lain dengan bergabungnya partai oposisi menjadikan para ketua-ketua umum partai menggadaikan partai untuk kepentingan pribadi ketua umum dan para kroninya, pasca bergabungnya ketiga partai oposisi tersebut KMP menjadi bubar pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan periode kedua berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan dilakukannya Reshuffle cabinet pada periode kedua adalah karena ada pejabat menteri yang tertangkap korupsi, mepercepat kinerja cabinet, refreshing untuk memperkuat cabinet, ada pejabat menteri yang mengundurkan diri yaitu kemenpora mengundurkan diri karena pejabat tersebut tergabung dalam organisasi asosiasi sepak bola, juga karena Jokowi melakukan peleburan pada dua kementerian yaitu Kemendikbud dengan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek dan juga karena Presiden Joko Widodo membentuk kementerian baru yaitu menteri Investasi (Putri, 2022), maka berdasarkan latar belakang diatas didapatilah dua fenomena pada dua periode pemerintahan Joko Widodo sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan dukungan partai pendukung Jokowi sebagai kandidat calon presiden antara periode pertama dan periode kedua Jokowi. Tabel 1.1.
2. Terjadinya reshuffle cabinet pemerintahan presiden Jokowi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahan presiden Jokowi. Tabel 1.2.

Maka berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Perbandingan Pola Koalisi Partai Politik Pada Periode Pertama Dengan Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Presiden Joko Widodo merupakan kandidat yang terpilih pada dua periode yang secara berturut yakni pada pemilihan presiden pada tahun 2014 yang diusung oleh empat partai, yaitu tiga dari partai nasionalis PDI-P, NASDEM, HANURA dan satu dari partai islam yaitu PKB dengan jumlah dukungan partai yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kubu lawanya mendapatkan dukungan dari enam partai, tiga dari partai nasionalis GEINDRA, GOLKAR, PAN, dan tiga dari partai islam PKS, PPP, PBB, sedangkan pada periode kedua maju Joko Widodo maju sebagai kandidat petahanan mendapatkan dua dukungan tambahan yaitu dari partai Golkar dan partai PPP sehingga pada pemilihan presiden pada tahun 2019 Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin mendapatakan dukungan dari enam partai, sedangkan dari kandidat kubu penantang yaitu Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mendapat dukungan dari empat

partai. Namun selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup sering terjadinya reshuffle pada kabinetnya yaitu empat kali pada cabinet kerja pada periode pertama dan empat kali pada cabinet Indonesia Maju pada periode kedua.

Atas urgensi tersebut lah penelitian ini dilakukan dalam mengkaji bagaimana perbandingan pola koalisi partai politik pada periode pertama dengan periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo, Maka dari itu didapatkan rumusan masalah yang akan dilakukan pada pembahasan pada tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan koalisi partai politik yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo?
2. Apakah koalisi yang dibangun berhubungan dengan untuk memuluskan penetapan kebijakan politik Presiden Joko Widodo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan Pola Koalisi Partai Politik yang terjadi pada periode pertama dengan periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo.
2. Untuk mengetahui Apakah penetapan kebijakan reshuffle kabinet berhubungan dengan untuk memuluskan penetapan kebijakan politik Presiden Joko Widodo.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan sebagai bahan yang menjadi referensi kedepan pada penelitian yang sama yang berkaitan dengan bagaimana pola koalisi partai politik pada periode 2014-2019 masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan dapat memahami bagaimana perbandingan pola koalisi partai politik pada periode pertama dengan periode kedua pemerintahan Joko Widodo, adalah untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya reshuffle cabinet pada dua periode kepemimpinan dan penetapan kebijakan reshuffle kabinet berhubungan dengan untuk memuluskan penetapan kebijakan politik Presiden Joko Widodo, hal ini dilakukan untuk juga dapat mengetahui perbandingan penerapan dan efek kebijakan selama presiden Joko-Widodo menjabat selama dua periode kepemimpinannya bagi peneliti penelitian ini bermanfaat tentunya dalam pemenuhan salah satu syarat menjadi sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pembuka yang akan menguraikan pembahasan skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah

penelitian yang selanjutnya sebagai bahan awal dengan menampilkan data primer yang didapati penulis dan dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai alat dalam menganalisa. Penelitian ini menganalisis bagaimana pola koalisi partai politik yang terjadi selama cabinet pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 dan juga pada bab ini akan menguraikan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dan apa yang akan dilakukan oleh peneliti agar terlihat apa yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Ada pun konsep dan teori yang digunakan yaitu berhubungan dengan Koalisi, Politik, strategi politik serta konsep-konsep lainnya yang masih berhubungan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai metode yang digunakan dengan memakai metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa sub-bab yang mana peneliti akan menguraikan jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, bukan kesimpulan dari setiap bab-bab yang ada.

